

SABTU KLIWON, 7 MARET 2015
(16 JUMADILAWAL 1948)

KOTA YOGYA

SERTIFIKASI SG DAN PAG TERUS BERJALAN

Pemerintah Komit Jaga Keistimewaan DIY

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat tetap berkomitmen menjaga keberadaan tanah kasultanan atau Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) dengan sertifikasi. Hal ini sebagai wujud negara yang mengakui keistimewaan DIY sehingga keberadaan tanah-tanah kraton dan puro tersebut akan dilindungi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan usai bersilaturahmi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (6/3).

"Tanah itu kan mempunyai riwayat, sejarah dan kemanfaatan. Sehingga ada nilai di sana yang disebut tanah memi-

liki dimensi emosionalitas, spiritualitas, kebudayaan. Jadi tanah itu bukan semata-mata kepemilikan dalam pengertian sempit tetapi juga ruang hidup," jelas Ferry.

Ferry menuturkan tanah harus dijaga berdasarkan aspek historis, nilai dan budayanya sehingga menegaskan bukan kepemilikan. Mengingat tanah itu memiliki sesuatu yang sangat multidimensi dan

fungsi. Apabila orang melihat SG dan PAG kering dari sisi lahan kepemilikan rasanya menjadi hilang konteksnya.

"Tanah itu tidak tiba-tiba muncul tapi mempunyai unsur membangun budaya, nilai dan sejarah dalam sebuah sistem kehidupan antara lain tanah SG dan PAG yang saat ini sedang proses pendataan sekaligus sertifikasi. Kami berkomitmen untuk menjaga itu apalagi negara sudah mengakui keistimewaan DIY, sebagaimana di Aceh dan Papua," paparnya.

Sedangkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan proses pen-

dataan dan sertifikasi SG dan PAG terus berjalan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY. Dengan keistimewaan yang melekat pada DIY yang dituangkan dalam Undang Undang Keistimewaan (UUK) urusan pertanahan, maka SG dan PAG akan mendapatkan payung hukum legal formalnya.

"Sertifikasi SG dan PAG tersebut bukan lantas masyarakat tidak bisa menggunakannya, namun sertifikasi ini lebih ke unsur pendataan dan inventarisasi yang pada akhirnya tetap bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat umum," ujarnya. **(M-3)-f**